

# PANDANGAN SANTRI MA'HAD ALY TENTANG PENGARUS-UTAMAAN GENDER DI PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'İYAH SUKOREJO, SITUBONDO, JAWA TIMUR

Mufidah Ch.\*

**Abstract:** *Gender discourse does present particular problems within Muslim societies mainly for three reasons, (1) the strong presence of patriarchal culture within Muslim society (2) the strong literal tendency in interpreting religious texts, and (3) the strong sense of animosity toward the Western culture. There is a few however among Muslims in Indonesia who are willing to negotiate with gender issues not as a discourse but as a practical principles that should rather be applied in our daily life. For this group of people patriarchal culture and literal interpretation of religious texts are problematic. This group thinks that the idea of gender equality is an inherent part of Islam and must therefore be accepted. Among this few is the students of Ma'had Aly in the East Javanese town of Situbondo. These students are concerned with implementation issues of gender equality rather than with debating this problem as a discourse. This paper explores the ideas of these students and relates them with the general debate that takes place on the national level concerning the issue of gender equality.*

**Keywords:** gender discourse, patriarchal culture, literal tendency, Western culture

## Pendahuluan

Konsep gender menjadi topik pembahasan dalam berbagai seminar, diskusi, maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan “ender”, dan diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Istilah ‘gender’ yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Lips mengartikan gender sebagai *cultural expectations for women and men*, atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Wacana gender dan Islam yang berkembang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu bahwa; *Pertama*,) Islam dianggap memiliki *daya tarik*, terutama dalam mengkaji secara intens tema-tema seputar pengembangan pemikiran kontemporer yang berkaitan dengan isu HAM, pluralisme, dan gender; *Kedua*,) Islam memiliki *daya dorong* bagi umatnya untuk tidak hanya mengkritisi masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga bagaimana mereka mengambil peran signifikan dalam mencari solusi atas permasalahan ini.

Diterbitkannya majalah *Ulum al-Qur'an* pada tahun 1995 merupakan *embrio* yang mempertegas besarnya minat para pemikir Islam kontemporer untuk mengkaji isu gender dalam konteks keagamaan (baca: ke-Islam-an). Majalah tersebut memuat beberapa artikel tentang wacana gender dan mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Disusul kemudian oleh

---

\* Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Zaitunah Subhan<sup>1</sup> melalui disertasinya (1998) mengkaji wacana kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dalam perspektif tafsir al-Qur'an dan *hadith*, baik menurut mufassir klasik maupun tafsir yang disusun oleh ulama' Indonesia, yakni Hamka, dan Mahmud Yunus, serta tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Menurutnya, kemitrasejajaran lelaki-perempuan di Indonesia masih normatif, dan belum didukung oleh kajian fenomena sosial sehingga masih tampak bias laki-laki. Nasaruddin Umar<sup>2</sup>, juga meneliti tentang kesetaraan gender dalam perspektif al-Qur'an. Melalui pendekatan hermeneutik yang bercirikan pemahaman pada konteks budaya pengguna bahasa, sebagaimana dalam memahami al-Qur'an diperlukan tidak hanya pendekatan tekstual tetapi juga pendekatan interdisipliner.

Akan tetapi, ketika itu informasi yang terdapat di dalamnya belum mampu menyentuh seluruh komunitas masyarakat. Kenyataan ini mungkin disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu; *Pertama*, isu gender tidak (atau, belum?) sampai pada para pemuka agama seperti kiai; *Kedua*, masyarakat tidak terlalu peduli dengan wacana yang dalam tataran tertentu dapat dikatakan "sulit dicerna." Wacana gender *vis-a-vis* keislaman masih menjadi bahan diskusi di kalangan terbatas, seperti pelajar, mahasiswa, dosen, dan peminat studi keislaman kontemporer, bahkan kegiatan tersebut masih memperoleh tantangan dari berbagai pihak.

Sahal Mahfudh<sup>3</sup> menegaskan bahwa sulitnya mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat muslim pada dasarnya berbasis pada tiga asumsi dasar dalam beragama, yaitu; *Pertama*, asumsi *dogmatis* yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap; *Kedua*, keyakinan *dogmatis* bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah dibanding laki-laki; *Ketiga*, pandangan *materialistik*, yaitu ideologi masyarakat pra Islam Mekkah yang memandang rendah peran perempuan dalam proses (re)produksi. Ketiga asumsi tersebut bertentangan dengan Islam sebagai agama *rahmah li al-'alamin* yang menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk terhormat sebagaimana laki-laki.

Shahrul<sup>4</sup> mengkaji isu perempuan melalui perspektif fiqih. Ia prihatin terhadap kajian tentang perempuan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam yang mencoba memberikan solusi di luar Islam yang berdampak pada kebingungan umat Islam. Problem perempuan dalam Islam tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan konsep Islam tentang perempuan yang autentik yang bersumber dari batasan-batasan hukum Allah dan dilakukan oleh umat Islam sendiri. Sejumlah kesalahan yang teridentifikasi oleh Shahrul yang dilakukan oleh pengkaji masalah

<sup>1</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari > *Tarikh al-Tabari* > *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, "Skisme dalam Islam : Tinjauan singkat secara kritis-historis terhadap proses dini perpecahan sosial-keagamaan Islam", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar-Rachman (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 668.

<sup>3</sup> G.E. Bosworth, *Dinasti-dinasti Islam*, ter. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1993), 24.

<sup>4</sup> *Tabi'ah* dan Zubair keduanya adalah sahabat setia Nabi SAW, dan mengangkat sumpah setia kepada 'Ali bin Abi *Tabi'*, tetapi karena tuntutan keduanya agar 'Ali segera mengadili pembunuh 'Uthman terabaikan, maka keduanya mencabut sumpah setia kepada 'Ali dan pergi ke Basrah untuk menghimpun kekuatan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan 'Aishah dan mereka bersepakat untuk melakukan perlawanan kepada 'Ali. Bergabungnya 'Aishah untuk memberontak 'Ali juga dimotivasi oleh a). antara 'Ali dan 'Aishah sudah lama ada pertentangan terutama sejak peristiwa *hadith al-'ifq*. b). Pada saat Abu-Bakr (ayah 'Aishah) diangkat sebagai khalifah, Ali tidak segera melaksanakan *bay'iah* dan cenderung membangkang c). Ada keinginan dari 'Abd Allah bin Zubair (kemenakan 'Aishah) menjadi khalifah menggantikan 'Uthman. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 288.

perempuan di masa lalu khususnya yang terkait dengan metodologi antara lain; *Pertama*, tidak ada pemilahan antar ayat-ayat yang mengangkat tema perempuan yang satu dengan tema perempuan yang lain. Demikian pula dalam membahas *ḥadīth-ḥadīth* tentang perempuan; *Kedua*, apa yang telah dihasilkan oleh Nabi tentang hak-hak perempuan dianggap telah final, pada hal masalah perempuan terus berkembang. Karena kesalahan metodologi ini, Shahrur menawarkan ide bahwa pembebasan perempuan dalam Islam telah dimulai oleh Nabi, tetapi belum berakhir pada saat ini; *Ketiga*, kesalahan metodologis dalam memahami sebagai ayat yang memuat tema perempuan sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap perempuan.

Ia menawarkan solusi; *Pertama*, jika ingin setia pada credo Islam adalah solusi maka harus digali teori hukum dan teologi Islam baru yang memberikan ruang pada pluralitas, HAM, demokrasi, perempuan, dan membersihkan masyarakat dari paham fatalisme (*jabariyah*); *Kedua*, untuk menegakkan ide Islam sesuai dengan ruang dan waktu, serta dapat menerima dan menyelesaikan kebekuan, melalui teori 'limit' atau 'batas' atau *hudud* (batas-batas hukum Allah), yang akan mengintegrasikan ide-ide manusia. Teori batas mengatakan bahwa ketetapan ilahiyah dalam teks suci berbentuk batasan minimal dan batasan maksimal. Di antara keduanya masalah manusia dapat dicarikan solusi secara elegan.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat diterima di kalangan tokoh agama, namun penolakan masih seringkali terjadi di tingkat *implementasi*. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh tidak (atau belum) adanya strategi pengintegrasian gender yang tepat ke dalam sub-sub kultur muslim, di mana sebuah tradisi patriarkhis telah terbangun begitu kokohnya, antara lain di kalangan masyarakat pesantren itu sendiri.

Pondok Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam, dakwah, dan pengabdian pada masyarakat tertua di Indonesia. Lembaga ini dikenal memiliki sistem pendidikan dengan ciri-ciri dan karakteristik yang khas. Keberadaannya sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat, dengan menampakkan kebhinekaan dan kemandirian, seiring dengan proses islamisasi di Indonesia. Meski demikian, besarnya kontribusi pesantren dalam pengembangan ajaran Islam di Indonesia menyisakan satu problem mendasar, yaitu terkait dengan isu kesetaraan dan keadilan kesetaraan gender. Hal ini terlihat pada adanya kesenjangan akses, partisipasi, peran, dan tanggung jawab yang dimiliki pelajar (santri) putra dan putri, baik pada aspek pengambilan kebijakan, sistem manajemen, pembelajaran, bahan ajar, dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Akibatnya, *output* santri putra memiliki potensi lebih besar untuk memainkan peran publik di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu pesantren yang secara intens telah melakukan kajian gender dan Islam adalah Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Konsep Gender pertama kali dikenal di kalangan santri Ma'had Aly pada tahun 1996, ketika lembaga tersebut menyelenggarakan seminar dengan nara sumber Masdar F. Mas'udi, Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Acara dikemas dalam bentuk kajian gender dalam Islam dan bedah buku, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>Latar belakang terjadinya perang Siffin hampir sama dengan perang Jamal yaitu Mu'awiyah selalu membakar kemarahan warga dan menuntut 'Ali bin Abi Tālib untuk menghukum pembunuh 'Uthman. Dan karenanya 'Ali memberhentikan Mu'awiyah sebagai gubernur. Tetapi hal itu ditolak, karena penolakan itu 'Ali mengirim 50.000 tentara untuk menumpas pemberontakan Mu'awiyah dan mereka bertemu di lembah Siffin. Ibid, 198.

Hingga penelitian ini dilakukan, problem strategi Pengarus-utamaan gender di pesantren ini belum dapat dipecahkan. Dari sini tampak kesadaran gender telah dimiliki oleh para santri, tetapi rumusan implementasinya belum ditemukan. Namun demikian wacana gender dalam konteks keislaman Kajian lebih lanjut terus dilakukan oleh para santri melalui forum diskusi, seminar, workshop, pelatihan dan penelitian, dan melalui mata kuliah *Bahḥ al-masa'il* dan *Fiqh Mu'asharah*. Isu gender juga menjadi bahan kajian yang cukup menarik di samping HAM dan pluralisme. Gender telah terintegrasi ke dalam wacana fiqh kontemporer saat perkuliahan berlangsung dan masih intens dilakukan hingga sekarang ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis mengasumsikan bahwa Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur merupakan institusi yang memiliki potensi cukup baik untuk mengembangkan kajian gender dan Islam, suatu wacana yang umumnya tidak diminati oleh kebanyakan pesantren.

Penelitian/kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang; *Pertama*, pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam menurut santri Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur; *Kedua*, latar belakang konstruk pemikiran para santri Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam ; *Ketiga*, implementasi pemikiran santri Ma'had Aly tentang Pengarus-utamaan gender (PUG) dalam Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Penelitian diharapkan dapat melahirkan pemikiran teoritik mengenai pandangan pesantren tentang konsep kesetaraan gender dan implementasi Pengarus-utamaan gender di kalangan pesantren. Kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami konsep Pengarus-utamaan gender yang dapat beradaptasi dengan tradisi pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada fenomenologi,<sup>6</sup> dengan paradigma definisi sosial yang berkarakter mikro subyektif yang berkerangka epistimologi bahwa bagaimana santri Ma'had Aly memaknai, menilai, dan mempersepsi kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, kemudian bagaimana Pengarus-utamaan gender yang diterapkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui observasi; *Pertama* observasi langsung pada lokasi khusus di Ma'had Aly untuk mendapatkan gambaran tentang santri Ma'had Aly putra dan putri; *Kedua*, observasi pemeran serta pada seluruh unit di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai implementasi Pengarus-utamaan gender (PUG) di pesantren ini.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data dari subyek penelitian dan informan, baik informan primer, yakni para santri maupun *informan* sekunder, yaitu para kiai, nyai, pengasuh PP. Salafiyah Syafi'iyah, dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahimy, guru senior perempuan dan kepala sekolah putri, Kepala Lembaga Penulisan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), presenter Radio BASA Situbondo Jawa Timur, dan Redaktur Bulletin

<sup>6</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu dan Kedua* ter.Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 85.

Tanwirul Afkar Ma'had Aly. Penulis kemudian mengadakan wawancara panel (*focused group discussion*/FGD)<sup>7</sup> untuk mendapatkan data emik tentang permasalahan penelitian.

Untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, penulis menggunakan metode dokumentasi antara lain Bulletin Tanwirul Afkar, beberapa tulisan tentang gender, baik yang ditulis oleh santri, pengasuh dan mahasiswa dalam bentuk tulisan, foto-foto tentang kegiatan kajian, seminar, workshop, pelatihan, hasil penelitian gender yang pernah dilakukan oleh para santri Ma'had Aly sejak kesetaraan gender diperkenalkan di pesantren ini hingga penelitian ini dilakukan.

Teknik analisis data dilakukan dengan prinsip *on going analysis*, yaitu melakukan analisis secara menyeluruh dan berulang-ulang pada proses penelitian. Penelitian ini dilengkapi pula dengan analisis gender yaitu menggunakan perspektif gender untuk; *Pertama*, mengidentifikasi pandangan santri Ma'had Aly terhadap isu-isu gender berikut argumentasi yang dikemukakan; *Kedua*, menemu-kenali kesenjangan gender yang terjadi di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah baik di tingkat kebijakan, manajemen, pembelajaran, pola asuh di asrama, dan budaya pesantren. Analisis gender digunakan dengan indikator kesetaraan gender yang mencakup akses laki-laki dan perempuan dalam aktifitas pesantren, partisipasi, peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, kontrol atas sumber daya yang ada di pesantren, dan manfaat dari aktifitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan di lingkungan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Suloarjo, Situbondo, Jawa Timur.

## **Pemahaman Santri Ma'had Aly tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam**

Ada tiga pandangan santri terhadap isu-isu gender dalam Islam; yakni *Konservatif*, *Progresif* dan *Moderat*.

*Konservatif*; Pemikiran konservatif di kalangan santri dapat diperhatikan pada respon mereka terhadap isu-isu gender yang dikaitkan dengan kajian fiqh kontemporer sebagaimana berikut.

- a) Perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari asal kejadian yang berbeda dengan laki-laki. Dasar teologis yang digunakan adalah QS. al-Nisa: 1, yang dipahami bahwa *nafs wahidah* adalah Adam, sedangkan Hawa diciptakan menyusul kemudian yakni dari salah satu tulang rusuk yang bengkok sebagaimana *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhari<sup>8</sup>. Dua landasan teks suci tersebut dipandang telah cukup memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan berbeda asal kejadiannya. Sebagaimana pendapat ulama' klasik seperti al-Thabari, al-Zamahshari, al-Alusi, al-Suyuti dan sebagainya;
- b) Laki-laki memiliki status lebih tinggi dari perempuan berdasarkan QS. al-Nisa: 34, dan QS. al-Baqarah: 228. Konsep nikah yang dimulai dari menentukan calon pasangan lebih didominasi oleh hak wali. Demikian pula relasi seksual suami istri, menentukan kehamilan

<sup>7</sup>Allamah M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, ter. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafindo, 1993), 38.

<sup>8</sup>W. Montgomery Watt, *Studi Islam Klasik: Wacana Kritik Sejarah* ter. Sukoyo et. al (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 12-99.

dan jumlah anak maupun jarak kelahiran, menyusui, merawat, mengasuh dan mendidik anak lebih ditentukan oleh suami. Istri hanya memiliki akses untuk mengusulkan idenya kepada suami, sedangkan keputusan akhir menjadi wewenang suami. Senada dengan pandangan ulama' klasik sebagaimana point 1;

- c) Kepemimpinan dalam rumah tangga mutlak diperankan suami berikut wewenang pengambil keputusan keluarga sebagaimana pandangan ulama' klasik. Sedangkan kepemimpinan publik dapat diperankan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan syarat jika tidak ada lagi laki-laki yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin, tidak ada laki-laki yang sanggup untuk menjadi pemimpin, dan perempuan yang akan mengakses menjadi pemimpin publik harus memperoleh ijin dari suaminya. Jika kemudian ada laki-laki yang dapat menganulir hal ini maka kepemimpinan berpindah pada laki-laki tersebut. Seperti halnya pandangan ulama' klasik yang mengkaitkan dengan *ḥadīth* Nabi yang menginformasikan tentang kekurangan akal dan agama (*nuqsān al-'aql wa al-dīn*) perempuan dibandingkan dengan laki-laki;
- d) Konsep wali *mujbir* dipandang masih relevan, sebab wali memiliki hak lebih dominan dari anak perempuannya terutama yang masih gadis, akad nikah tidak sah tanpa wali dan disyaratkan wali mutlak berjenis kelamin laki-laki. Sebagaimana pendapat Imam Mazhab kecuali Hanafi;

Pembagian peran gender dikonsepsikan bahwa laki-laki habitatnya adalah di ranah publik, sedangkan istri di ranah domestik. Landasan teks yang digunakan adalah QS. al-Nisa: 34, terkait dengan tugas pencari nafkah untuk keluarga adalah suami, dan QS. al-Aḥzāb: 33 yang dipahami sebagai ayat tentang domestikasi perempuan. Karena itu pembagian tugas diselaraskan dengan habitat masing-masing dengan harapan terjadi keseimbangan peran secara adil antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertimbangkan bahwa perempuan di era sekarang telah mengalami pergeseran peran akibat tingkat pendidikan perempuan yang semakin meningkat, kebutuhan ekonomi keluarga tidak hanya dapat dibebankan kepada suami. Dampak dari pandangan peran gender dikotomis adalah terjadinya beban berlipat bagi istri yang bekerja di luar rumah. Pandangan konservatif ini selaras dengan Ulama' klasik antara lain al-Ṭabarī<sup>9</sup>, Ibn Katsir<sup>10</sup>, al-Suyutī<sup>11</sup>, Rashid Ridā<sup>12</sup>, Muttaharī<sup>13</sup>, Shalah Qazan<sup>14</sup>, Abu Iqbal al-Mahallī<sup>15</sup>.

<sup>9</sup>Penggunaan periodisasi sejarah Islam di atas berdasarkan skema yang dikembangkan oleh Marshall G.S. Hodgson. Ia membuat ikhtisar sejarah dunia Islam sebagai berikut: Periode Sasani Akhir dan Khilafah Awal (485-692), Periode Kekhalifahan Tinggi (692-945), Periode Islam Pertengahan Awal (945-1258), Periode Islam Pertengahan Kemudian (1258-1503), Periode Kekaisaran Mesir Serbuk (1503-1789), dan Masa teknis Modern (1789-sekarang). Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Islam*, Buku Pertama Lahirnya sebuah Tataan Baru ter. Mulyadhi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), 138-139.

<sup>10</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 201-252.

<sup>11</sup>Muḥammad 'Abid al-Jabirī, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabi, 1991), 76.

<sup>12</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 13.

<sup>13</sup>Nurcholish madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budhy Munawar-Rachman (ed). (Paramadina: Jakarta, 1994), 311.

<sup>14</sup>Tentang ziarah ke makam para wali di Dunia Islam seperti Mesir, Sudan, Maroko, Tunisia, Turki, dll, Lihat Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot (ed). *Ziarah dan Wali di Dunia Islam* ter. Jean Couteau et.al (Jakarta: Serambi, 2007).

<sup>15</sup>Di antara tarekat-tarekat yang lahir pada periode ini adalah tarekat Qadiriyyah, Sadziliyyah, Satariyyah, dll. Lihat Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

*Progresif*; Konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh tipe progresif berdasarkan tanggapan mereka terhadap isu-isu gender dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a) Asal kejadian perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari unsur yang sama dengan Adam, berdasarkan QS. al-Nisa: 1 bahwa *min nafs wahidah* bukan dimaknai Adam tetapi jenis yang sama sebagaimana pendapat Abduh dan Ridha. Adapun *Hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak dapat diterima secara tekstual karena adanya kesamaan informasi yang diperoleh dari tradisi agama Nasrani dalam Kitab Perjanjian Lama, sehingga ada kecurigaan terjadi infiltrasi Israiliyat yang selama ini dijadikan sumber penafsiran di kalangan para ulama' tafsir. Menurut pandangan progresif, lebih mengembalikan pada sumber al-Qur'an yang tidak menjelaskan sedikitpun tentang kasus tulang rusuk bengkok sebagai asal usul Hawa, jadi asal kejadian laki-laki maupun perempuan adalah dari bahan yang sama;
- b) Hak-hak reproduksi perempuan lebih mengedepankan hak-hak individu, di mana fungsi yang berhubungan dengan organ reproduksi perempuan menjadi hak sepenuhnya perempuan. Laki-laki atau suami berperan sebagai pendukung, penyedia fasilitas, pelindung dari keamanan dan kenyamanan proses reproduksi dan pasca reproduksi. Hak-hak reproduksi dalam hal memilih dan menentukan pasangan menurut pandangan progresif adalah menjadi hak perempuan secara mandiri dengan tanpa mengabaikan peran wali. Dalam melakukan relasi seksual suami istri merupakan hak keduanya. Sedangkan dalam hal menentukan kehamilan, jumlah anak, jarak kelahiran dan penggunaan alat kontrasepsi, menjadi hak perempuan secara mandiri karena dia yang paling tahu tentang kondisi organ reproduksinya. Pandangan progresif memberikan kebebasan perempuan untuk memutuskan mana terbaik bagi dirinya. Adapun peran menyusui, merawat, mengasuh dan mendidik anak dipandang sebagai peran gender yang bersifat fleksibel beradaptasi dengan kemampuan, kesempatan, komitmen dan kearifan budaya tanpa mengurangi indikator kesetaraan gender yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
- c) Laki-laki dan perempuan bisa mengambil peran yang sama dalam kepemimpinan pada dua ranah tersebut. Dasar teks suci yang digunakan sama dengan tipe konservatif maupun moderat yaitu QS. al-Nisa: 34, namun pemahaman terhadap ayat tersebut berbeda. Menurut pandangan progresif *al-rijal* dan *al-nisa* dipahami sebagai maskulin dan feminin yang lebih dekat pemaknaannya dengan peran gender, berbeda dengan kata *al-dhakar* dan *untha* yang dipahami sebagai laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan biologis sebagaimana pendapat Umar<sup>16</sup>. Sehingga pemimpin dalam hal ini adalah siapa saja di antara keduanya yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut bukan atas dasar keterpaksaan atau darurat, tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak termasuk bentuk kepemimpinan yang diputuskan keduanya. Adapun kepemimpinan perempuan di ranah publik tidak perlu dipermasalahkan karena dasar teologis yang digunakan adalah *hadith* Nabi yang secara khusus ditujukan kepada Bauran bint Kisra bukan pada perempuan secara umum. Lagi pula dalam al-Qur'an tidak disebutkan larangan bagi perempuan untuk mengemban peran kepemimpinan publik sebagaimana Ratu Balqis yang digambarkan sebagai sosok pemimpin

<sup>16</sup>Ibnu Taimiyah, "Tangga Pencapaian", dalam *Khazanah Intelektual Islam*, Nurcholish madjid (ed). (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 247..

perempuan dengan citra positif.

- d) Waris dan saksi dipahami sebagai masalah mu'amalah yang dapat berubah tergantung pada urgensi dan kemanfaatannya. Laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan cara-cara yang adil dalam pembagian waris sesuai dengan kondisi ahli waris dan peran pencari nafkah yang dibebankan kepada keduanya. Menurut pandangan progresif, saksi laki-laki atau perempuan tidak perlu lagi dilihat dari aspek jenis kelamin dan jumlah yang disediakan, tetapi secara proporsional lebih menggunakan pertimbangan relevansi masalah dengan saksi yang diperlukan. Saksi bagi perempuan tidak dapat dipertahankan sebagaimana ditegaskan oleh teks, karena ayat tersebut tidak dapat dipahami lepas dari historisnya. Saksi perempuan sebagaimana saksi laki-laki telah menjadi realitas sosial yang sama-sama diperlukan dalam kasus-kasus tertentu menyesuaikan dengan perubahan kondisi umat Islam saat ini. Dasar teologis yang dikemukakan adalah teks suci yang mengatur tentang pembagian waris dan jumlah saksi tidak lepas dari sosio-kultural yang telah ada. Teks turun tidak dalam kondisi ruang hampa atau masyarakat yang steril dari konteks sosialnya. Karena itu penafsiran atas teks tersebut tidak dapat mengabaikan aspek historisitasnya—untuk menemukan makna dan motif di balik aturan yang terkandung dalam teks tersebut. Adapun wali menurut pandangan progresif mengacu pada pendapat Hānafiyyah bahwa wali tidak menjadi rukun maupun syarat sahnya akad nikah, karena itu jika perempuan menjadi wali posisinya sama dengan keberadaan wali laki-laki sebagai penguat berlangsungnya akad nikah. Namun pandangan ini masih mempertimbangkan keberadaan wali *mujbir* jika dalam kondisi tertentu diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan bukan dalam rangka mengabaikan hak-haknya;
- e) Pembagian peran gender menurut pandangan progresif tidak perlu dipersoalkan lagi, karena gender merupakan bentukan kultur yang disosialisasikan oleh lingkungan dan orang-orang yang berpengaruh, namun dapat berubah atau diubah sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, kepantasan budaya, dan fleksibel senantiasa beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan. Pembagian peran dikotomis tidak ada dasar teologis yang mengatur, hanya konsep nafkah yang dibebankan pada suami menjadi penyebab laki-laki diberi peran pada sektor produktif-publik, namun tidak terkait sama sekali dengan boleh tidaknya perempuan bekerja di mana saja ia berada sepanjang harkat dan martabat perempuan tetap terjaga dengan baik. Menurut pandangan progresif, pengambil keputusan di mana perempuan bekerja juga tidak ditentukan oleh suami atau walinya semata, tetapi keputusan secara individu untuk menentukan yang terbaik bagi diri perempuan menjadi pertimbangan utama.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan progresif subyek penelitian tentang isu-isu kesetaraan gender dapat dikategorikan responsif gender, di mana hak-hak dasar laki-laki dan perempuan mendapatkan posisi setara. Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat diperoleh secara adil antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana pandangan Aminah Wadud<sup>17</sup>, Fatimah

---

<sup>17</sup>Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* ter. Abdullah Ali et al (Jakarta: Serambi, 2006), 496.



Mernissi, Riffat Hasan<sup>18</sup>, Qasim Amin<sup>19</sup>, Shahjuri<sup>20</sup>, Asghar Ali<sup>21</sup>, Mansour Fakih<sup>22</sup>, Nasarudin Umar<sup>23</sup>, Husein Muhammad<sup>24</sup>.

*Moderat*; Kata moderat sering digunakan dalam berbagai tulisan yang dipahami sebagai kelompok yang berdiri di antara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di Indonesia organisasi Islam yang sering disebut sebagai kelompok moderat adalah Nahdlatul Ulama', dan Muhammadiyah. Demikian pula pemikir Islam yang cenderung memosisikan diri pada dua kubu di atas juga disebut sebagai orang-orang moderat. Istilah ini digunakan sebagai salah satu tipologi pemikiran subyek penelitian di Ma'had Aly yang berada di antara tipe konservatif dan tipe progresif.

Santri yang menggambarkan tipe moderat memahami kesetaraan gender secara umum mengacu pada argumentasi teologis yang didialogkan dengan konteks sosio-kultural pada masyarakat muslim. Respon mereka terhadap isu gender dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Asal kejadian perempuan pertama (Hawa) bahwa Hawa diciptakan bukan dari tulang rusuk Adam karena dalam al-Qur'an tidak ada petunjuk yang mengacu pada perbedaan asal kejadian laki-laki maupun perempuan. *Hadith* yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk dimaknai bukan secara hakiki tetapi secara metaforis;
- b) Pandangan moderat tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam diatur secara seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki. Reproduksi perempuan menjadi hak dan tanggung jawab keduanya atas dasar penyerapan dari nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang terkandung dalam teks al-Qur'an maupun *hadith* Nabi. Menentukan pasangan menjadi hak bersama antara wali dengan anak perempuan. Relasi seksual suami istri, menentukan jumlah anak, penggunaan alat kontrasepsi, menentukan jarak kelahiran merupakan hak bersama karena di samping istri yang memiliki organ reproduksi—suami juga memiliki hak sebagai penanggung jawab dan pendukung peran reproduksi istrinya. Hak dan tanggung jawab menyusui, merawat, mengasuh dan mendidik anak menurut pemikiran moderat agak dikotomis, misalnya tanggungjawab menyusui dibebankan pada ibu berdasarkan pemahaman QS. al-Baqarah: 233. Peran merawat dan mengasuh anak diutamakan ibu dengan alasan karakter seorang ibu yang cenderung feminin, lemah lembut dan *telaten*. Sedangkan pendidikan anak bersifat fleksibel dapat dilakukan oleh ayah atau

<sup>18</sup>Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin, et.al (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 954.

<sup>19</sup>Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam*, Terj. Khairon Nahdiyyin (Yogyakarta: LKIS, 2007), xxvii.

<sup>20</sup> Ibid., xxxiv.

<sup>21</sup>Charles Kurzman, "Pengantar: Islam Liberal dan Konteks Islaminya" dalam *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, ed. Charles Kurzman, Terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2003), xv-xvii.

<sup>22</sup>Akbar S Ahmed, *Postmodernisme: Bahasa dan Harapan Bagi Islam* ter. M. Sirozi, (Bandung: Mizan, 1993), 167 – 176.

<sup>23</sup>Istilah 'kontemporer' merupakan kelanjutan dari modernisasi. Sedangkan batasan Islam kontemporer tidak diketahui secara pasti, namun kebanyakan pemikir Arab sendiri menganggap 'kontemporer' (*mu'asirah*) bermula sejak kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967, karena kekalahan tersebut merupakan titik yang menentukan dalam sejarah politik dan pemikiran Arab modern. Kemal K. Karpat, *Political and social in The Contemporary Middle East* (New York: Praeger Publishers, 1982), 13-14.

<sup>24</sup> Issa J. Boullata, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought* (Albany: State University of New York Press, 1990), 3-4.

- ibu sesuai dengan kompetensi dan kesempatannya;
- c) Kepemimpinan perempuan di wilayah domestik menurut tipe ini tetap dipegang oleh suami berdasarkan QS. al-Nisa: 34. Namun kepemimpinan dimaksud tidak bersifat otoriter, tetapi lebih bersifat demokratis sebagaimana seorang pemimpin yang bijaksana dan kasih sayang, karena *qawwam* yang diberikan kepada suami dipahami sebagai pelindung yang melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman bagi istrinya. Sedangkan kepemimpinan di wilayah publik bagi tipe moderat ini tidak dipermasalahkan—hanya saja perempuan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki kompetensi, memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan *mudharat* atas diri mereka, keluarga, dan masyarakatnya;
- d) Wali dalam pandangan moderat tidak lepas dari konsep mereka tentang hak-hak reproduksi perempuan, di mana wali dalam konteks pernikahan diperlukan sebagai rukun akad nikah—mirip dengan pandangan konservatif, namun keberadaan wali bagi mereka tidak memiliki wewenang mutlak dalam menentukan pasangan bagi anak gadisnya. Wali tetap disyaratkan harus laki-laki. Wali mujbir masih diperlukan dalam kondisi khusus seperti anak gadis yang ideot, kurang pengalaman, pendidikannya rendah—dengan syarat terpenuhinya seluruh persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Shafi'i<sup>25</sup> sehingga fungsi wali bersifat akomodatif dan tetap terjaminnya hak-hak perempuan.
- e) Berdasarkan uraian di atas penulis sampai pada kesimpulan bahwa pandangan tipe moderat di satu sisi masuk kategori bias gender jika dilihat dari aspek kesamaan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam beberapa argumentasi berdasarkan pemahaman teks suci, tetapi dapat pula dikategorikan responsif gender jika dilihat dari aspek perubahan pemikiran yang berakar dari pemahaman tekstual kepada pemahaman kontekstual dan adaptatif dengan kondisi kekinian, sebagaimana pandangan Al Butfi<sup>25</sup>, Hibbah Rauf Izzat<sup>26</sup>, Quraish Shihab<sup>27</sup>.

Ketiga tipe pandangan subyek penelitian tersebut secara rinci dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1  
Tipologi Pandangan Santri Ma'had Aly terhadap Keadilan dan Keadilan Gender

Konservatif	Progresif	Moderat
Patriarkhis- Bias gender → Kholil Keadilan dan keadilan gender tidak dapat lepas dari fiqh klasik dan budaya yang telah ada, sebagian penafsiran teks telah final.	Gender Sensitif → Muktakif, Suwardi Diskriminasi gender sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi. Perlu reinterpretasi teks suci.	Akomodatif –Sadar gender (Gender Awareness) → Rifai Keadilan dan keadilan gender dapat dipahami melalui berbagai sumber informasi yang mendukung, perlu reinterpretasi teks suci, beradaptasi dengan kultur.

<sup>25</sup> A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam <http://media.isnet.org>

<sup>26</sup> Perkembangan sosiologi Prancis diawali dengan munculnya aliran filsafat positivistik yang dimotori—di antaranya—oleh Claude Henri Saint-Simon (1760-1825), Auguste Comte (1798-1875), dan Emile Durkheim (1858-1917). George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosial Modern*, 16-20.

<sup>27</sup> A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi

Apatis- Netral gender→ Mulyadi Kesetaraan dan keadilan gender tidak terlalu penting, akan terjadi perubahan status, peran dan relasi gender secara otomatis, sebgai teks suci direinterpretasi seperlunya.	Feminis →Farida Diskriminasi gender sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi. Perlu reinterpretasi teks suci. Perlu perubahan riil dalam tindakan.	Adaptatif- Sadar gender (Gender Awareness)→Haris Kesetaraan dan keadilan gender dimulai dari pembiasaan dalam keluarga dan masyarakat, perlu reinterpretasi, beradaptasi dengan kultur.
	Aktualisasi diri (Self-Actualization)→Nurul Murtasiyah Diskriminasi gender sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi. Perlu reinterpretasi teks suci. Perempuan perlu membuktikan bahwa dirinya bisa berkompetisi dengan laki-laki.	
Ulama' klasik (al Thabari, Ibnu Katsir, al Suyuthi, dsb), Rashid Ridha, Muttahari, Shalah Qazan, Abu Iqbal al Mahalli.	Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Riffat Hasan, Qasim Amin, Shahjuz, Asghar Ali, Mansour Fakih, Nasarudin umar	Al Butti, Hibbah Rauf Izzat, Quraish Shihab.

### Latar Belakang Konstruksi Pemikiran Santri Ma'had Aly tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam

Pandangan santri Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dilatarbelakangi oleh konteks sosial, secara langsung maupun tidak, turut mewarnai pemikiran mereka mengenai kesetaraan gender dalam Islam. Identifikasi terhadap latar belakang konstruksi pemikiran santri Ma'had Aly ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah subyek yang dianggap merepresentasikan masing-masing pemikiran.

Adapun latar belakang konstruksi pemikiran tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam di kalangan santri Ma'had Aly PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo antara lain; *Pertama*, Pendidikan sebelum memasuki Ma'had Aly, latar sekolah, dan pesantren yang mendidiknya, turut mewarnai konsep gender; *Kedua*, perlakuan dari orang tua/keluarga yang berupa harapan dan konsep tentang cara membentuk anak laki-laki dan anak perempuan menyebabkan keragaman perspektif santri terhadap kesetaraan gender. Penanaman konsep gender melalui proses pembiasaan oleh orang tua dapat membentuk konsep diri (*self concept*) anak dan sikapnya dalam berinteraksi lintas gender di masyarakat; *Ketiga*, Sumber informasi dan referensi tentang gender yang dibaca oleh santri turut mewarnai pandangan mereka tentang kesetaraan gender; *Keempat*, intensitas dalam mempelajari isu gender melalui ruang budaya seperti *bahth al-masail*, diskusi di kelas, seminar, dan menyusun karya tulis ilmiah yang diikuti secara intens juga membentuk kesadaran dan kepekaannya terhadap isu-isu gender dalam Islam; *Kelima*, figur yang mereka tiru tidak hanya ketika mereka belajar di Ma'had Aly, tetapi juga kiai

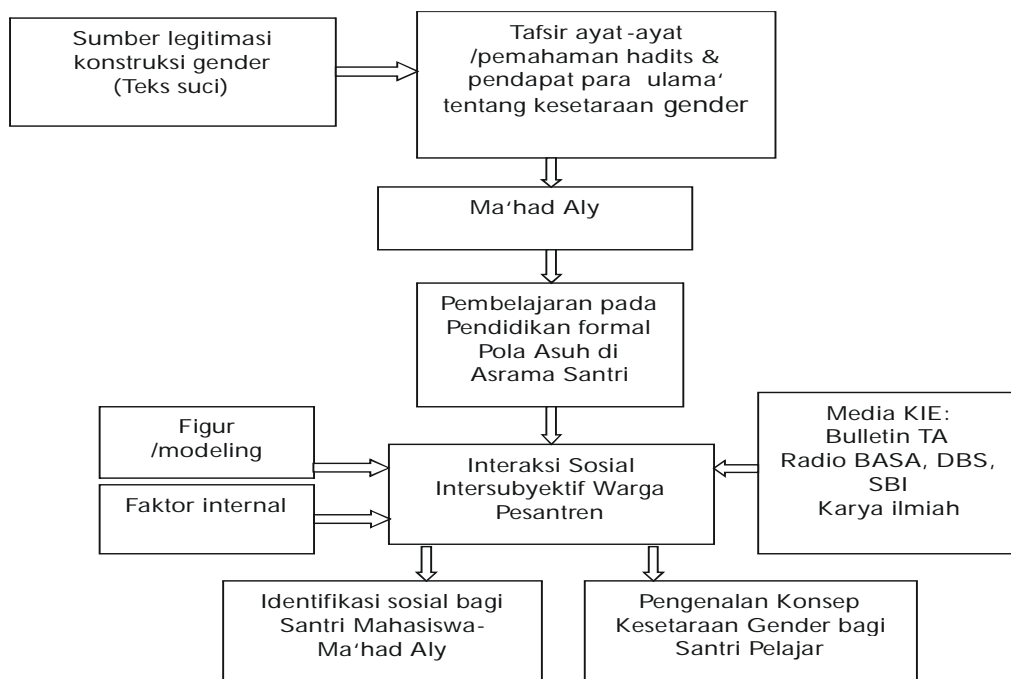
sebelumnya sangat dominan mewarnai perspektif mereka tentang gender, kendatipun figur tersebut memiliki pandangan yang kontra dengan kiai di pesantren ini.

### Implementasi Pengarus-utamaan Gender di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah

Secara umum potret kesetaraan gender di lingkungan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo adalah sebagai berikut; *Pertama*, masuknya isu-isu kesetaraan gender di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo melalui pembahasan fiqh kontemporer di kalangan santri Ma'had Aly dilakukan tidak melalui desain dan tekanan, tetapi secara alami menjadi bahan kajian yang cukup intens di kalangan elit santri dalam waktu panjang dan dengan cara gradual; *Kedua*, para santri Ma'had Aly mengenalkan isu gender melalui tulisan bulletin *Tanwirul Afkar* yang dapat diakses oleh seluruh warga pesantren dan alumni kemudian turut membentuk wawasan santri tentang kesetaraan gender dalam Islam; *Ketiga*, ditemukan kesenjangan gender pada manajemen pesantren, peran pengambilan keputusan dan kompetensi santri putri lebih rendah dalam penguasaan membaca kitab kuning (*qira'at al-kutub*).

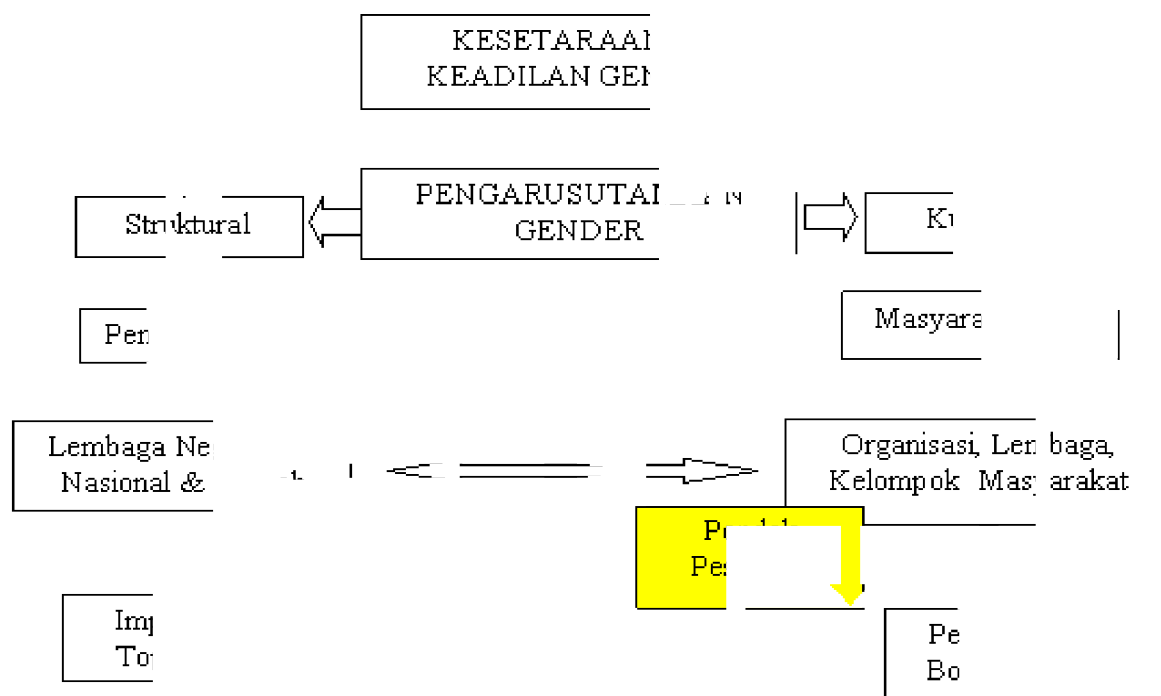
Wacana kesetaraan gender yang disuarakan oleh santri Ma'had Aly, warga pesantren mengakui bahwa Ma'had Aly sebagai pusat pengembangan fiqh kontemporer memiliki kontribusi dalam melakukan perubahan pemahaman kesetaraan gender secara kultural. Penyebaran ide-ide pembaharuan yang dimotori oleh Ma'had Aly, lebih cepat direspon di kalangan mahasiswa hingga membentuk identifikasi sosial. Di samping dimuat pada bulletin TA, gender diperbincangkan melalui interaksi dan diskusi, serta *obrolan* santai di kampus. Adapun di kalangan santri pelajar isu-isu kesetaraan gender belum ditemukan cara-cara yang tepat dan bersifat formal dalam mengintegrasikan gender dalam pembelajaran, karena belum dibicarakan secara khusus hingga adanya kebijakan PUG pada pendidikan formal di tingkat ini.

Adapun secara garis besar proses konstruksi sosial implementasi PUG di PP. Salafiyah Syafi'iyah dapat diperhatikan skema berikut ini.



Implementasi PUG di PP. Salafiyah Syafi'iyah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan Inpres nomor 9/2000 yang ditawarkan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran pengambil kebijakan melalui jalur struktural yang bercirikan imperatif dan *top down*. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah memiliki strategi khusus, yakni melalui kekuatan kiai, nyai, pengasuh, dan elit santri yang berfungsi sebagai *gender focal point* yang ditunjang oleh pemanfaatan sumber daya atau ruang budaya yang ada merupakan komponen kunci untuk mewujudkan pesantren yang responsif gender. Pendekatan adaptatif, kompromis, kultural, persuasif dan *bottom up* menjadi kekuatan tersendiri sebagai strategi implementasi PUG basis pesantren yang bercirikan patriarkhis. Untuk lebih jelas, dapat diperhatikan skema sebagai berikut.

**Skema 2**  
**Jalur Pengarus-utamaan Gender**



## Penutup

Berdasarkan perspektif teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann bahwa konstruk pemikiran santri Ma'had Aly melalui tiga momen yaitu eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi<sup>28</sup> dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Santri Ma'had Aly memiliki kesamaan dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender difahami sebagai kesamaan hak-hak dasar, posisi dan tanggung jawab yang sama serta sama-sama memiliki akses, partisipasi dan manfaat. Keadilan gender dipahami sebagai pemberian peran dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan, bisa dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Adapun pandangan mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender serta implementasinya di pesantren adalah beragam. Keragaman makna tersebut dalam inter-subyektifnya disadari di kalangan para santri sebagai keniscayaan karena

<sup>28</sup> Ibid.

masing-masing santri memiliki dasar argumentasi yang berbeda-beda. Keragaman tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi, yaitu pandangan *konservatif*, *moderat*, dan *progresif*. Tipe konservatif memiliki dua bentuk; *Pertama*, Konservatif Patriarkhis-Bias gender. *Kedua*, Konservatif Apatis-Netral gender. Tipe progresif memiliki tiga bentuk; *Pertama*, Progresif-Gender sensitif; *Kedua*, Progresif-feminis; *Ketiga*, Progresif-aktualisasi diri (*Self Actualization*). Tipe moderat terbagi menjadi dua bentuk; *Pertama*, Moderat Akomodatif-Sadar gender (*Gender Awareness*); *Kedua*, Moderat Adaptatif-Sadar gender (*Gender Awareness*).

2. Latar belakang pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, serta konstruksi sosial kehidupan mereka antara lain adalah; *Pertama*, latar belakang pendidikan sebelum belajar di Ma'had Aly; *Kedua*, pola asuh atau perlakuan dari orang tua/keluarga; *Ketiga*, sumber informasi dan referensi tentang gender yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran inovatif di bidang *masa'il al-fiqhiyah al-as'iyah* yang melahirkan fiqih responsif gender; *Keempat*, intensitas dalam mempelajari isu gender di pesantren; *Kelima*, figur yang mereka tiru (*modeling*) yakni kiai yang telah memiliki perspektif gender dalam mengembangkan pemikiran kontemporer di bidang kesetaraan gender dalam Islam, dan memiliki sensitifitas gender dalam praktik kehidupan sehari-hari.
3. Implementasi pengarus-utamaan gender di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, masuknya isu-isu kesetaraan gender di pesantren Salafiyah Syafi'iyah melalui studi fiqih kontemporer di kalangan santri Ma'had Aly secara alami menjadi bahan kajian yang cukup intens di kalangan elit santri dalam waktu panjang dan dengan cara gradual; *Kedua*, para santri Ma'had Aly mengenalkan isu gender melalui tulisan bulletin *Tanwirul Afkar* yang dapat diakses oleh seluruh warga pesantren dan alumni kemudian turut membentuk wawasan santri tentang kesetaraan gender dalam Islam; *Ketiga*, ditemukan kesenjangan gender pada manajemen pesantren, peran pengambilan keputusan dan kemampuan dalam penguasaan membaca kitab kuning (*qira'at al-kutub*); *Keempat*, jika diukur dengan pedoman implementasi Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dengan memperhatikan pada kondisi awal dan komponen kunci yang ada, maka PUG di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur belum sepenuhnya dilaksanakan, namun jika dipandang dari konsep awal PUG berdasarkan konferensi khusus perempuan yang diselenggarakan di Nairobi (1985) bahwa PUG merupakan strategi untuk mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan secara luas di masyarakat, maka Pesantren Salafiyah Syafi'iyah secara embrional telah melakukan upaya implementasi pengarus-utamaan gender yang berbeda dengan PUG pada jalur struktural.
4. Adapun implikasi teoritiknyanya adalah bahwa implementasi pengarus-utamaan gender penelitian ini *mengembangkan* atau *melengkapi* model implementasi pengarus-utamaan gender melalui kebijakan politik yang bersifat *top down* dan imperatif sebagaimana yang dirumuskan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang Pedoman Pelaksanaan Inpres nomor 9/2000 tentang Implementasi Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarus-utamaan gender di Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur dilakukan secara kultural, dialogis, adaptatif, gradual melalui

pemanfaatan ruang budaya yang ada, yang dimulai dari reformulasi konsep gender dan Islam yang dirumuskan dan diterapkan oleh *insider* pesantren bukan melalui relasi kuasa, doktrin dan dirumuskan oleh *outsider*.

## Daftar Rujukan

- Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*, terj. Syaiful Alam. Yogyakarta: IRCISoD, 2003.
- al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn al-Kathir al-Yamamah, 1987.
- al-Buti, M. Said Ramadhan. *Perempuan antara Keadilan Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj. Darsim Ermaya Imam Fajruddin. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- . *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Rida, Muhammad Rashid, *Nida lil Jinsi al Lathif*, Terjemah, Ahmad Rivai Usman dan Abdul Shukur Abdur Razzak, *Perempuan Sebagai Kekasih: Hakekat, Martabat dan Partisipasinya di Ruang Publik*, Bandung: Hikmah, 2004.
- al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, TT
- Shahin, Muhammad. *Nahw usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami fi Fiqh al-Mar'ah*. Syiria, Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 2000
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- al-Tabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al Fikr, 1978.
- Tim Peneliti. *Menjadi Perempuan*. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999.
- Tim Penyusun. *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.
- Tim Penyusun. *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Edisi II)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Aminah. *Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemah, Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Zaitunah Subhan. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999
- . *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam*, Jakarta: el Kahfi, 2002.